

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika.

Aryatie, I. R., SH, M., Oemar Moechthar, S. H., Kn, M., Widjaja, A. M., & SH, M.

K. (2022). Pemahaman Seputar Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Jakad Media Publishing.

Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Jakarta Timur: Prenada Media.

Bachtiar. (2018) Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Unpam Press.

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng. (2024). Pengalihan Sertifikat elektronik kabupaten buleleng 2024. Buleleng: BPN Kabupaten Buleleng.

Friedman, L. M. (2016). Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.

Hadjon, P. M. (2020). Pengantar hukum administrasi negara. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Kartono. (2019). Peradilan dan Penegakan Hukum di Era Digital. Yogyakarta: Andi Offset.

Mahfud, M. D. (2021). Hukum dan transformasi digital: Tantangan dan peluang di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

Marzuki, P. M. (2022). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Puspasari, S., & Sutaryono, S. (2017). Integrasi Agraria–Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang. STPN Press dan PPPM.

- Rahardjo, S. (2021). *Hukum progresif: Teori dan aplikasi dalam konteks digitalisasi hukum*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Santoso, U. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Jakarta: Prenada Media.
- Slamet, R. (2023). *Birokrasi digital dan implementasi hukum: Studi kebijakan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Winarwati, I. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kota Malang: Setara Press.

ARTIKEL DALAM JURNAL

- Abon M.A., Dantes K.F., Adnyani, N.K. (2022). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *e-Journal Komunikasi Yustisia*. 5(3). 64-75.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Transformasi Digital Layanan Publik Pertanahan: Hak Tanggungan Elektronik pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 26-49.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(2), 130-143.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Penguatan Kewilayahan dengan Pemetaan Keunggulan Potensi Daerah di Era New Normal. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 3(1), 59-66.
- Atikah, N. (2022). Kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 263-289.
- Azzahra, D. F. (2024). Kajian Yuridis Implementasi Redistribusi Tanah Sebagai Instrumen Reformasi Agraria: Upaya Mewujudkan Reformasi Agraria Yang Berkeadilan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(3), 41-50.

- Dantes, K. F., & Hadi, I. G. A. (2021). Kekuatan Hukum Akta Jual Beli yang Dibuat Oleh Camat dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan PPAT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 905-916.
- Dantes, K. F., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022, September). *The future impact of electronic signature (e-signature) in the E-GMS of limited liability companies. In AIP Conference Proceedings* (Vol. 2573, No. 1). AIP Publishing.
- Destriana, A., & Allagan, T. M. P. (2022). Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Administrasi Pertanahan Melalui Sertipikat Tanah Elektronik. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 8(1), 91-106.
- Fadilla, A. R., & Wulandari, P. A. (2023). Literature review analisis data kualitatif: tahap pengumpulan data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34-46.
- Habibi, S. A., Prambudi, G. S., Trisnawati, T., & Wulandari, R. (2025). Transformasi Digital Administrasi Pertanahan: Implementasi Dan Tantangan Sertipikat Elektronik Di Indonesia. *RIO LAW JURNAL*, 6(1), 499-507.
- Khair, V. M., & Assyahri, W. (2024). Optimalisasi Administrasi Pertanahan di Indonesia: Tantangan dan Strategi Menuju Kepastian Hukum. *Journal of Public Administration and Management Studies*, 2(2), 55-62.
- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157-174.
- Masri, E. (2023). Kebijakan penerbitan sertipikat elektronik pada sistem pendaftaran tanah di Indonesia untuk mewujudkan kepastian hukum. *Krtha Bhayangkara*, 17(1), 157-174.
- Maulana, H., Nugraha, N., Arinda, R., Fikri, M., & Wahanisa, R. (2024). Urgensi Sertifikat Elektronik dengan Pemantauan Berbasis AI untuk Efisiensi

Pendaftaran Tanah dan Mitigasi Mafia Tanah di Indonesia. *Journal Customary Law*, 2(1), 9-9.

Pelapu, I. J. (2024). Kepastian Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris. *Lex Privatum*, 14(2).

Rampi, E. C. A. (2018). Kepastian Hukum Terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita). *Lex Privatum*, 6(9).

Rumlus, M. H., & Hartadi, H. (2020). Kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik. *Jurnal Ham*, 11(2), 285-299.

Sumarta, P. Y. E., Dewi, A. R., & Nurasa, A. (2022). *Declaration of Complete Land Registration in Buleleng Regency*. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 2(1), 43-63

Yoyo, T. (2022). Pengaruh Kualitas Produk, Inovasi dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk SEIV (Studi Kasus PT. SEIV Indonesia). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 243-254.

ARTIKEL ELEKTRONIK

Antara. (2014). Akar ketimpangan ekonomi ada di akses terhadap lahan. Diambil dari <https://www.antaranews.com/berita/470538/akar-ketimpangan-ekonomi-ada-di-akses-terhadap-lahan>

Kopi. (2022). Reforma Agraria Kurangi Ketimpangan Penguasaan Tanah. Diambil dari <https://pro.kutaitimurkab.go.id/2022/05/25/reforma-agraria-kurangi-ketimpangan-penguasaan-tanah/>

Yuniarto, T. (2022). UU Pokok Agraria: Tonggak Keadilan Pertanahan. Diambil dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/uu-pokok-agraria-tonggak-keadilan-pertanahan>

SKRIPSI

Sari D., & Rosita N,P. (2024) Akibat Hukum Terhadap Tumpang Tindih (Overlapping) Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng. Undergraduate thesis, Universitas Pendidikan Ganesha.

Setyani, A. N. (2022). Analisis Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Dalam Prespektif Kepastian Hukum (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak) (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran RI Normor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.